BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pegawai merupakan sumber daya yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan suatu satuan kerja. Pegawai yang berkualitas akan memudahkan satuan kerja dalam mencapai tujuannya, baik dalam hal pengabdian maupun pelayanan (Basarodin and Maradona, 2017). Upaya meningkatkan kualitas kinerja seorang pegawai negri yaitu adanya kenaikan jabatan. Jabatan merupakan kedudukan yang menunjukan tingkat seseorang Aparatur Sipil Negara. Kenaikan jabatan adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Aparatur Sipil Negara, serta sebagai dorongan untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya. Oleh karena itu perlu adanya penilaian dalam menentukan kenaikan jabatan (Frieyadie, 2016).

Aparatur Sipil Negara merupakan salah satu bagian dari pegawai kantor kementrian hukum dan hak asasi manusia lampung. Peran sistem pendukung keputusan sangat dibutuhkan guna meningkatkan efisensi pengambilan keputusan. Peran sistem pendukung keputusan akan membantu pihak kepegawaian dalam mencapai tujuan dari peneliaian kinerja pegawai, seperti kenaikan jabatan,tanpa mengesampingkan parameter-parameter yang sudah ditentukan oleh pihak instansi terkait (Fitriyani *et al.*, 2016). Selama ini, penilaian kinerja pegawai di kantor kementrian hukum dan hak asasi manusia lampung dilakukan oleh bagian kepegawaian yang berkoordinasi dengan kepala instansi.

Proses kenaikan jabatan didapat dari surat rekomendasi atau usulan dari pimpinan unit kerja daerah ke pemimpin instansi berwenang di atasnya berdasarkan penilaian pegawai dan kriteria tertentu. Untuk dapat menentukan seorang Pegawai Negeri Sipil bisa naik jabatannya (kriteria) dilihat sesuai dengan PP Nomor 13 Tahun 2002 yaitu berstatus PNS, Serendah-rendahnya

memiliki pangkat satu tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan, memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir, Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan, Sehat jasmani dan rohani, Senioritas dalam kepangkatan dan usia.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka diperlukan sebuah solusi untuk mempermudah proses pangambilan keputusan rumah sakit terbaik dengan menggunakan metode *Analitical Hirarchy Process* (AHP) yang merupakan representasi dari sebuah masalah yang kompleks dalam suatu terstruktur multi level dimana level pertama adalah tujuan, level faktor, kriteria, sub kriteria dan seterusnya sehingga dapat dikelompokan menjadi suatu bentuk hirarki maka permasalahan akan tampak lebih tersetruktur dan sederhana (Supriadi, Dkk), metode tersebut mampu menyeleksi alternatif dari beberapa alternatif berdasarkan krteria-kriteria yang telah ditentukan (Prayoga, 2018). Adapun kriteria yang ditentukan yaitu pengembangan diri serta orang lain, komunikasi, pelayanan publik, sosial kultur dan manajerial administrasi. Pengembangan sistem yang dilakukan perlu adanya kesesuaian dengan pihak perusahaan maka diperlukan metode pengembang sistem *extreme programming* adalah pendekatan *Extreme Programming* merupakan suatu pendekatan berorientasi objek dan sebagai pengembangan perangkat lunak cepat sedikit lebih rinci dengan tujuan memberikan ulasan secara ringkas dan memiliki keunggulan untuk menyesuaikan dengan keinginan pengguna sehingga sistem yang dihasilkan sesuai kebutuhan (Pressman, 2012).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan yaitu bagaimana membuat sistem pendukung keputusan kenaikan kandidat pejabat kantor wilayah kementrian hukum dan hak asasi manusia Lampung menggunakan metode *Analitical Hirarchy Process* (AHP).

1.3 Batasan Penelitian

Adapun batasan masalah pada sistem yang akan dikembangkan sebagai berikut:

a. Penelitian ini di laksanakan di kantor kementrian hukum dan hak asasi manusia lampung.

b. Kinerja atau ketentuan yang dinilai mencakup sasaran individu dan kontribusi individu.

c. Sistem ini dibuat berbasis *website*.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan konsep untuk mencapai suatu yang diinginkan, tujuan penelitiannya yaitu :

1. Menghasilkan sebuah sistem berbasis web yang dapat digunakan untuk mendukung keputusan kenaikan jabatan kantor wilayah kemntrian hukum dan hak asasi manusia Lampung dalam menentukan kenaikan jabatan pegawai yang dipromosikan.
2. Mempermudah pihak kepegawaian dalam mencapai tujuan dari penilaian berbasis web untuk promosi kenaikan jabatan tanpa mengesampingkan parameter-parameter yang sudah ditentukan oleh pihak instansi terkait.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dihasilkan dari pembuatan sistem sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

a) Mengetahui penerapan metode *Analitical Hirarchy Process* (AHP) kenaikan kandidat pejabat kantor wilayah kementrian hukum dan hak asasi manusia lampung.

b) Untuk menambah pengetahuan dan memperluas dan wawasan bagi peneliti khususnya tentang penilaian kinerja pegawai kantor wilayah kementrian hukum dan hak asasi manusia lampung.

2. Bagi Pegawai

a) Sistem ini dapat membantu manajemen dalam penilaian kinerja pegawai secara efektif dan efisien.

b) Dapat mendorong pegawai untuk mencapai VISI tujuan dan untuk memacu pegawai lain dalam prestasi kinerjanya.